

## DAFTAR PUSTAKA

- Arskal Salim. 2015. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd
- Bambang Riyadi Lany (Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya), *Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, 2015, Tasikmalaya, Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya.
- Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Bhenjamin Hoessein, *Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 -18 Juli 2003 di Bali.
- Budiardjo, Miriam. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Dedi Nursyamsi. 1997. *Tugas dan Wewenang MPR Menurut Undang-Undang Dasar '1945 dan Praktek Pelaksanaanya*, Tesis S2 UII – Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1996.
- Diana Hakim Koentjoro. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Dunsire, A. 1978. *Control in a Bureaucracy*. New York.
- Etzioni, A. 1968. *The active society: a theory of societal and political proses*, London.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.

- Giddings, Philip. et al., *Controlling Administrative Action in the United Kingdom: The Role of Ombudsman System and The Court Comparad*, Rev. of Administrative Sciences, Kol. 59 Nr.
- Gunawan Setiardja. 2010. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE. Hlm 196
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hoogerwerf, A. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- I Nyoman Nurjaya. 2008. *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Hukum di Indonesia dalam Perspektif Antropologi Hukum, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Malang: In-Trans Publishing,
- Idhat C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iis Mardeli, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Artikel Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Iman Sudyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2012
- Indrohato. 2014. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Irfan Fachruddin. 2014. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni
- J.G. Brouwer dan Schilder. 2017. *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen
- Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Jhon Griffiths. 2005. *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*, dalam buku *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: HuMa,
- Jimly Asshiddiqie 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2006.
- Kaelan, 2009. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.
- M. Uzair Fauzan. 2007. *Politik Representasi dan Wacana Multikulturalisme dalam Praktik Program Komunitas Adat Terpencil (KAT): Kasus Komunitas Sedulur Sikep Bombong-Bacem, dalam Hak Minoritas*. Cetakan kedua. Jakarta: Yayasan Interseksi.
- M.Yuhdi, 2014. *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Malang, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Miriam Budiardjo. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mochammad Munir. 1996. *Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mohammad Dauh Ali. 1990 *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Moleong L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Muhamad Jusuf. 2014. *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usah Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nata Irawan. 2017. *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Niemeijer, E & J.S. Timmer, *Het ABC van de Nationale ombudsman: arbiter, bewaker en consulent*, Bestuurskunde, Nr. 8.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Noma tif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Guru Besar, 10 Oktober 1994, UNAIR, Surabaya.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rikardo Simarmata & Bernadinus Steni, *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*
- Riska Wijayanti. 2014. *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan*, Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 7 No.2
- Rochmad, Noor. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia: Peran dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- S . F. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Salman, Otje, R, 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni*, Bandung .
- Sjamsul Rakan, 2008. *Kedudukan Pengacara Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis S2 UII – Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya.

- \_\_\_\_\_. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- \_\_\_\_\_. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1981
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwoto Mulyosudarmo. 2010. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Ten Berge, J.B.J.M, 1991. *De beketenis van de Nationale ombudsman voor het bestuursrecht*, in: de Nationale ombudsman, VAR-reeks 106, Alphen aan den rijn
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2012. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*.

### **Jurnal, Makalah, dan Majalah**

- Aartje Tehupeiorry, *Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa Sesuai UU Desa*. Jurnal
- Abdul Fatah Fanani, dkk, *Analisis Undang-Undang Desa*, Jurnal Dialektika, Volume 4 No. 1, Februari 2019
- Adnan, Hasyim. *Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Al'Adl, volume VIII Nomor 2, Mei Agustus 2016.
- Alfana, Ganang Qory *Model Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Perspektif Undang-Undnag No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No.1 –Maret 2020.
- Aswar, Darmawel. *Optimalisasi Program Jaksa Jaga Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Dana Desa, Laporan Proyek Perubahan, Program*

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020.

Ateng Syafrudin. 2015. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung

Febrian, Rangi Ade *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)*, jurnal dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR.

M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan No. 74/PDT.G/2009/PN.YK, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014

Mokhammad Najih, *Dilemma Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Law Islamic in the National Legal Reform*. Makalah pada Conference on "Religion, Law, and Social Stability", Brigham Young University, Provo, Utah, US, 2016

Muhammad Helmy Hakim, *Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke Sosio-Legal*, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16 No. 2 Desember 2016

Nurul Firmansyah, *Adat Desa Administratif: Kontestasi Politik Revisi Perda Nagari*, Makalah disampaikan dalam Workshop "New Law, New Village? Changing Rural Indonesia", pada tanggal 19-20 Mei 2016 yang diselenggarakan oleh KITLV bekerjasama dengan The Asian Modernities and Traditions (AMT) Research Program, The Van Vollenhoven Institute of Leiden University, dan Norwegian Centre for Human Rights at The University of Oslo, di Leiden, Belanda

Rusadi Kantaprawira. 2018. Hukum dan Kekuasaan. Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Rusdianto, *Fungsi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015.

Simanjuntak, Juristoffel. *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdat dan Tata Usaha Negara (TUN)*, Jurnal Lex Administratum, Vo. VI/No.1/Jan-Mar/2018.

Sulistiyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Pluralisme Hukum dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-3, pada 16-19 Juli 2002

Warta Pengawasan, *Membangun Good Governance Menuju Clean Government* 2015.

Zidane Tumbel, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. VIII/No.1/Jan-Mar/2020

### **Internet**

Firmansyah Siregar, Surat Dakwaan,  
(<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>)

Hermawan, Bayu. 2019. Masyarakat Baduy Tolak Dana Desa. Retrieved at <https://republika.co.id/berita/pmwhb2370/nasional/daerah/19/02/14/pmwgn1354-masyarakat-baduy-tolak-dana-desa>

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. (

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa